

ABSTRAK

Beban pembiayaan glaukoma semakin tinggi seiring meningkatnya angka populasi tua dan kepesertaan BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kasus dan beban pembiayaan glaukoma selama 8 tahun (2015 – 2023) yang dapat digunakan sebagai evaluasi pelayanan dan pembaruan kebijakan kesehatan.

Penelitian ini merupakan studi retrospektif berupa 1% sampel dari seluruh peserta JKN Kesehatan tahun 2015 hingga 2023. Sampel berupa pasien dengan diagnosis glaukoma sesuai koding ICD-10 (H40, H44.51, Q15) sebagai diagnosis primer dan sekunder yang berada di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut disertai klaim tarif INA-CBGs. Analisis deskriptif digunakan untuk mencari tren jumlah kasus beban pembiayaan per tahun.

Prevalensi glaukoma di Indonesia meningkat hingga mencapai 2,64 per 1000 penduduk. Sedangkan insidensinya 505 per 100.000 penduduk pada tahun 2023. Klaim glaukoma pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 68% dibandingkan tahun 2015 seiring peningkatan jumlah peserta, kunjungan dan tindakan pembedahan. Terjadi perubahan tren klaim rawat inap menjadi rawat jalan mulai tahun 2016. Ekstraksi katarak mendominasi pada tata laksana pembedahan glaukoma. Berdasarkan jumlah klaim, RS Khusus Mata dan RS Kelas B mempunyai proporsi tindakan operatif tertinggi. Seorang pasien dalam setahun melakukan kunjungan minimum 1x dan maksimum 47x, serta menghabiskan minimum Rp 140.700,00 dan maksimum Rp 34.122.000,00. *Total expenditure per capita* glaukoma tahun 2023 menurun sebesar 33,5% dibandingkan tahun 2015, yaitu sebesar Rp1.947.295,36 (118,35 USD)

Jumlah kasus glaukoma meningkat diiringi dengan jumlah kunjungan dan klaim yang bervariasi. Pemerintah, BPJS, rumah sakit dan tenaga kesehatan sebaiknya mulai memaksimalkan kecerdasan buatan untuk skrining awal, pengobatan rutin dan tindakan glaukoma yang lebih efisien.

Kata kunci: database klaim nasional, beban ekonomi, glaukoma, tren pembiayaan, pengeluaran per capita

ABSTRACT

The financial burden of glaucoma has increased alongside rising elderly populations and expanded health insurance (BPJS) coverage. This study aims to analyze glaucoma case numbers and financial expenditures over 8 years (2015–2023) to evaluate healthcare services and inform policy update.

This retrospective study analyzed a 1% sample of all National Health Insurance (JKN) participants from 2015–2023. Cases were identified using ICD-10 codes (H40, H44.51, Q15) for primary/secondary glaucoma diagnoses at advanced referral facilities, with INA-CBGs tariff claims. Descriptive analysis tracked annual case trends and financial burdens.

The prevalence of glaucoma in Indonesia reached 2.64 per 1,000 individuals in 2023, with an incidence rate of 505 per 100,000 people. Compared to 2015, glaucoma-related claims increased by 68%, driven by a rise in the number of participants, medical visits, and surgical procedures. A shift from inpatient to outpatient care was observed starting in 2016. Cataract extraction emerged as the predominant surgical intervention for glaucoma management. Based on claim volume, Eye Specialty Hospitals and Class B Hospitals account for the highest proportion of operative procedures. Annually, patients made between 1 to 47 visits, incurring costs ranging from IDR 140,700 to IDR 34,122,000 (≈USD 8.58–2,081). The per capita expenditure for glaucoma in 2023 decreased by 33.5% relative to 2015, amounting to IDR 1,947,295.36 (approximately \$118.35 USD)

The number of glaucoma cases is increasing, accompanied by varying numbers of medical visits and insurance claims. The government, BPJS, hospitals, and healthcare professionals should begin enhancing artificial intelligence for early screening, routine management, and more efficient glaucoma interventions.

Keywords: national claim database, glaucoma, healthcare expenditure trends, economic burden, expenditure per capita